

BANK DAN INVESTOR BAKAR UANG DI ENERGI KOTOR



MANY BANKS AND INVESTORS CONTINUE TO BURN MONEY IN DIRTY ENERGY

© December 2019

BANYAK negara, termasuk Indonesia, menyatakan akan beralih menggunakan energi terbarukan. Namun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, 2017-2019, pembiayaan untuk rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara secara global, ternyata terus meningkat.

Dari data yang dirilis oleh *Urgewald*, *Banktrack* dan 30 mitranya, di antaranya *Auriga Nusantara-coalexit.org*, diketahui terdapat dana sebesar US\$745 miliar yang digelontorkan untuk rencana pembangunan PLTU secara global. Bila dirupiahkan besarnya diperkirakan senilai Rp10.447 triliun. Hampir setengahnya, yakni 45 persen dari pendanaan tersebut atau senilai US\$334 miliar, setara dengan Rp4.683 triliun, berada di Asia.

MANY countries, including Indonesia, have claimed they would switch to using renewable energy. But, in the last 3 years, 2017-2019, funding for the development plan of coal-fired steam power plants (PLTU) globally continues to increase.

From the data released by *Urgewald*, *Banktrack*, and their 30 partners, including *Auriga Nusantara-coalexit.org*, US\$ 745 billion (Rp 10,447 trillion) was disbursed for PLTU development plan globally. 45 percent of this funding is in Asia or US\$ 334 billion, equivalent to around Rp 4,683 trillion.

Until the third quarter of 2019, bank loans provided for the PLTU development plan project in Indonesia have reached US\$ 47 billion or around Rp 658 trillion. Compared

ANTARA TAHUN 2017 - Q3 2019 TOTAL PENDANAAN PROYEK PEMBANGUNAN PLTU DI SECARA GLOBAL SEBANYAK:

IN 2017 TO Q3 OF 2019, TOTAL FUNDS
FOR THE DEVELOPMENT OF COAL-FIRED
POWER PLANTS GLOBALLY:



Sampai dengan квартал ketiga 2019, pinjaman perbankan yang telah diberikan untuk proyek rencana pembangunan PLTU di Indonesia nilainya mencapai US\$47 miliar atau senilai sekitar Rp658 triliun. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, pendanaan yang mengalir ke Indonesia merupakan yang paling besar, 69 persen mengalir ke Indonesia.

Angka-angka itu merupakan fakta yang menunjukkan Indonesia masih sangat bergantung dengan pengembangan energi fosil, khususnya batu bara. Sebagai gambaran, menurut data RUPTL 2019, jumlah kapasitas daya listrik terpasang bersumber dari PLTU di Indonesia totalnya kurang lebih 40.240,2 MW. Terbesar kedua se-Asia Tenggara setelah Philippina yang mencapai 42.482 MW.

Dana miliaran dolar itu secara global maupun konteks Indonesia, kontras dengan pernyataan-pernyataan negara-negara yang ingin beralih ke energi terbarukan. Apalagi

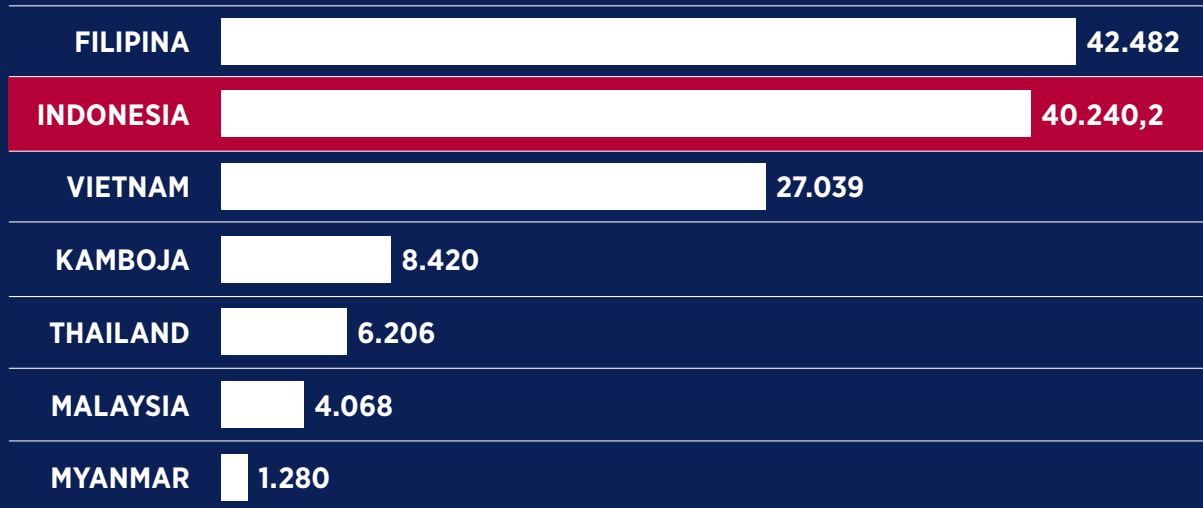
to other countries in Southeast Asia, the funding for coal-fired power plants flowing into Indonesia is the largest, with a value of around 69 percent.

These numbers indicate that Indonesia is still dependent on the development of fossil fuel energy, especially coal. As an illustration, according to RUPTL from of 2019, the amount of installed electric power capacity sourced from PLTU in Indonesia totals approximately 40,240.2 MW. The second largest in Southeast Asia is in the Philippines, which reached 42,482 MW.

These billion dollar investments, both globally and in Indonesia, contrast with the statements of countries that want to switch to renewable energy, especially with regard to the COP-climate change conference. From Secretary General Ban Kim Moon to Antonio Guterres, the United Nations' leadership encourages every country to immediately make the transition from fossil fuel energy to renewable energy.

KAPASITAS DAYA TERPASANG PLTU HINGGA Q3 2019 **DI ASIA TENGGARA** (MW)

PLTU INSTALLED POWER CAPACITY UNTIL Q3 2019 **IN SOUTH EAST ASIA** (MW)



Note: Kapasitas terpasang di Indonesia berdasarkan RUPTL 2019

Note: The installed capacity in Indonesia is based on RUPTL from 2019

kaitannya dengan konferensi perubahan iklim-COP. Sejak Sekretaris Jenderal Ban Kim Moon hingga Antonio Guterres, mendorong setiap negara untuk segera melakukan transisi energi dari fosil ke energi terbarukan.

Hanya saja, peningkatan jumlah dana yang diinvestasikan ke pembangkit batu bara, menunjukkan bahwa kepentingan bisnis masih terdepan ketimbang persoalan iklim. Yang salah satunya diakibatkan oleh penggunaan batu bara untuk pembangkit energi listrik. Ada kesan setengah hati, dalam upaya negara-negara untuk beralih ke energi terbarukan.

“Banyak negara, terkesan hanya sekedar memenuhi kewajibannya menyusun NDC berisikan soal 1.5 °C dengan salah satu caranya melalui transisi energi. Tapi tetap membuka lebar-lebar untuk investasi di energi kotor, dengan alasan proses transisi. Jumlah perencanaan proyek pembangunan

However, the increase in the amount of funds invested in coal plants shows that business interests continue to be prioritized over climate issues, particularly in regards to the use of coal for electricity generation. There appears to be a half-hearted effort by countries to switch to renewable energy.

“Many countries seem to be merely fulfilling their obligations to compile an NDC containing about 1.5°C through the transition of energy sources. But they continue to invest in dirty energy. The large number of PLTU power plant development projects such as relaxation of regulations, is one of the factors that continues to encourage investment in coal-fired power plants,” said M. Iqbal Damanik, mining and energy researcher from Auriga Nusantara.

Coal-fired power plants dominate Indonesia’s plans for accelerating electricity infrastructure development. There are

pembangkit listrik PLTU yang besar dan pemberian insentif, seperti relaksasi regulasi merupakan salah faktor yang terus mendorong investasi pembangkit listrik batu bara,” ujar M. Iqbal Damanik, peneliti tambang dan energi Yayasan Auriga Nusantara.

Jika dibandingkan berdasarkan masing-masing program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistikan, maka terlihat PLTU batu bara mendominasi proyek-proyek tersebut. Terdapat dua program pada pemerintahan Presiden SBY, yaitu *Fast Track Program* (FTP) I, dan II.

FTP I, sebesar 10.000 MW keseluruhannya merupakan PLTU batu bara. FTP II, kurang lebih 17.000 MW, atau 59 persennya adalah PLTU batu bara. Pada pemerintahan Jokowi dikenal program 35.000 MW. Masih juga sama dengan program pemerintahan sebelumnya, porsi pembangkit bersumber energi batu bara masih besar yaitu 55 persen.

Peran Bank BUMN, dalam merealisasikan target pemerintah tersebut sangat signifikan. Meski tidak paling teratas, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan BNI, terbukti berkontribusi cukup signifikan memberikan pinjaman untuk pembangunan PLTU.

Selain Citigroup, bank lain yang berada di posisi kedua pemberi pinjaman terbesar lainnya adalah Bank Mandiri sebesar US\$3,577. Selanjutnya ada CIMB Group, HSBC dan Standard Chartered di posisi 5 besar pemberi dana terbesar proyek PLTU di Indonesia.

OF THE TOTAL GLOBAL INVESTMENT IN COAL-GENERATED POWER, 9% IS IN SOUTHEAST ASIA - MOST OF WHICH IS IN INDONESIA. THIS INDICATES THAT INDONESIA (AND THE REST OF SOUTHEAST ASIA), IS A CRITICAL PART OF EFFORTS TO CLEAN UP DIRTY ENERGY.

9 PERSEN PEMBIAYAAN ENERGI KOTOR BATUBARA MASUK KE ASIA TENGGARA. DAN ITU DIDOMINASI OLEH INDONESIA. INI MENUNJUKKAN BAHWA INDONESIA (DAN JUGA ASIA TENGGARA) HARUS MENJADI PUSAT UPAYA PEMBERSIHAN ENERGI KOTOR.

two programs from the administration of President SBY: Fast Track Program (FTP) I and II. FTP I was as much as 10,000 MW of coal-fired power plants. FTP II is approximately 17,000 MW, 59% of which are coal-fired power plants. Under Indonesia's current President, Jokowi, the energy infrastructure plan for 35,000 MW includes coal-fired power as 55% of the total capacity.

The role of BUMN (state-owned) banks in realizing government targets is very significant. Although not the top investors, state-owned Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia and BNI, provided significant loans for the development coal-fired power plants.

Beside Bank Mandiri, another large lender for these energy projects is Citigroup, as much as US\$ 4,812 billion. Other large lenders in the top five list include CIMB Group, HSBC, and Standard Chartered.

“If other banks from China are directly or indirectly included, they are large enough to fund PLTU projects in Indonesia. Data collected by Auriga can be seen at [quitcoal.info](#). It shows that, not only banks from Europe, The United States, and domestic countries are funding the project, but that China and Japan are also sources of significant funding for PLTU projects in Indonesia. For example, China Development Bank and Mitsubishi UFJ Finance are top lenders,” said Iqbal

Deteriorating environmental conditions, health issues, climate change, and social and human rights problems should be considerations for the banking world in

15 BANK PENDANA PEMBANGUNAN PLTU DI INDONESIA HINGGA Q3 2019 (MILYAR US\$)

TOP 15 FUNDERS FOR PLTU DEVELOPMENT IN INDONESIA UNTIL Q3 2019

BANK OF PHILIPPINES	1.381,2
BNI	1.656,1
MIZUHO FINANCIAL	1.677,9
BRI	1.857,0
SMBC GROUP	2.102,6
MALAYAN BANKING	2.214,4
CREDIT AGRICOLE	2.251,1
DBS	2.254,9
BNP PARIBAS	2.360,3
MITSUBISHI UFJ FINANCE	2.969,6
STANDARD CHARTERED	3.279,4
HSBC	3.406,9
CIMB GROUP	3.498,7
BANK MANDIRI	3.577,1
CITIGROUP	4.812,7

Note: Pinjaman dari Bank-Bank China sebagian tidak langsung ke proyek, ada yang melalui Bank Nasional, seperti CDB melalui Bank Mandiri.

Note: Some loans from Chinese banks are not directly invested in projects, but the loans are made to state-owned banks as done by the China Development Bank to Bank Mandiri.

“Jika menyertakan perbankan lainnya yang berasal dari China yang langsung maupun tidak langsung, cukup besar mereka mendanai proyek PLTU di Indonesia. Data yang dikumpulkan oleh Auriga dapat dilihat di quitcoal.info. Hal itu menunjukkan bahwa, tidak hanya perbankan dari negara-negara di Eropa, Amerika dan dalam negeri saja yang mendanai proyek. China dan Jepang adalah negara yang cukup signifikan mendanai proyek PLTU di Indonesia. Misalnya *China Development Bank* dan *Mitsubishi UFJ Finance*,” tutur Iqbal.

giving their loans to power plant projects. Some banks have taken a stand by funding projects, while others are discriminatory, like HSBC. HSBC continues to fund coal energy projects in Indonesia and Vietnam, but no longer does so in other countries.

In addition, in June 2019, Credit Agricole, France, said it will no longer fund PLTU projects. AXA, France’s largest insurance company, stated it will not provide guarantees to PLTU projects.



Memburuknya kondisi lingkungan, kesehatan, iklim, termasuk munculnya masalah sosial dan HAM yang terjadi akibat pembangunan PLTU, semestinya menjadi pertimbangan bagi dunia perbankan memberikan pinjaman mereka ke proyek PLTU. Beberapa perbankan telah mengambil sikap untuk tidak mendanai proyek. Meski ada yang bersikap diskriminatif, seperti HSBC, mereka tetap mendanai proyek batu bara di Indonesia dan Vietnam, namun di negara lain tidak lagi.

Selain itu, pada Juni 2019, *Credit Agricole*, Perancis, menyatakan tidak akan lagi mendanai proyek PLTU lagi. AXA, asuransi terbesar Perancis, juga menyatakan hal sama, dengan tidak memberikan jaminan kepada proyek PLTU.

“Sepantasnya, perbankan di Indonesia melakukan hal sama, atau lebih menginvestasikan dananya ke pengembangan energi terbarukan. Dan dengan tegas menghentikan pinjaman luar negeri untuk proyek PLTU,” tutup Iqbal. ●

“Banks in Indonesia should follow this example and invest more funds into the development of renewable energy. And Indonesia should stop permitting foreign loans for PLTU projects,” concluded Iqbal. ●